MINI RISET

ANALISIS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUSAHAAN ASIA GRAHA SUKSES MANDIRI TULUNGAGUNG

Oleh :

Putri Intan Permata Sari	:	NIM. 1960301100008
Fadilatul Jannah	:	NIM. 1060301100028
Yedida Cahya Arisma Putri	:	NIM. 1960301100047

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
TAHUN AKADEMIK
2019 / 2020

ABSTRACT

The research we do here is motivated by various problems related to general trading and human resource development. The handling of problems related to this must also need to be supported by the existence of resources whose quality needs to be continuously improved. This study aims to determine the implementation of human resource development carried out by this company and its employees from 1997 through a training program for a minimum of 1 month or a maximum of 3 months. This research is a qualitative descriptive study conducted in the city of Tulungagung. The author uses purposive sampling technique by pointing out several informants who have a deeper understanding of the problem under study. The results of the research that we get from research are in the form data from interviews.

Keywords: *Implementation, Trade, Development, Training, and Human Resources (HR).*

ABSTRAK

Penelitian yang kami lakukan disini dilatarbelakangi karena berbagai masalah yang berhubungan dengan perdagangan bisnis dan pengembangan SDM. Penanganan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut harus perlu didukung juga dengan adanya sumber-sumber daya yang kualitasnya pun perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan ini serta pegawainya dari tahun 1997 melalui program pelatihan minimal selama 1 bulan atau maksimal selama 3 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kota Tulungagung. Penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan menunjuk dari beberapa informan yang lebih memiliki pemahaman lebih mendalam dari permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian yang kami peroleh dari riset adalah berupa data dari hasil wawancara.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Perdagangan, Pengembangan, Pelatihan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri merupakan sebuah perusahaan di Tulungagung yang bergerak di bidang perdagangan umum dan pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ini merupakan salah satu dari sekian jenis perusahaan jasa yang terkena pajak atau biasa disebut jasa kena pajak. Jasa dari perusahaan ini dikenai pajak pertambahan nilai, yang mana pajak ini merupakan pajak yang dibebankan kepada transaksi jual-beli atas barang ataupun jasa. Penelitian ini dilakukan demi mengetahui informasi terkait bagaimana perusahaan menyikapi pajak pertambahan nilai dari jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut serta dampak yang diberikan kepada perusahaan.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk dibahas adalah sebagai berikut :

- A. Bagaimana perusahaan menyikapi adanya pajak pertambahan nilai?
- B. Bagaimana sikap perusahaan dalam kegiatan pembayaran pajak?
- C. Apakah dampak adanya pajak pertambahan nilai untuk perusahaan?
- D. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak pertambahan nilai oleh perusahaan?

TUJUAN

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai ialah:

- A. Mengetahui tentang pendapat perusahaan tentang adanya pajak pertambahan nilai.
- B. Memahami tingkat kedisiplinan perusahaan dalam pembayaran pajak pertambahan nilai.
- C. Mengetahui apa sajakah dampak yang terjadi di perusahaan sehubungan dengan adanya pajak pertambahan nilai.
- D. Memahami bagaimanakah mekanisme pembayaran pajak pertambahan nilai yang dilakukan perusahaan.

LANDASAN TEORI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Hal ini disebabkan karena pajak penjualan tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Supramono (2009:125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi BKP maupun JKP.

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pada bagian umum, pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Mardiasmo (2009:269) menatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

Mardiasmo (2009:269) pajak penjualan mempunyai kelemahan, yaitu :

1. Adanya pajak ganda
2. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan
3. Tidak mendorong ekspor
4. Belum dapat mengatasi penyelundupan

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan, yaitu :

1. Menghilangkan pajak ganda
2. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya
3. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. Netral pola konsumsi dalam mendorong ekspor.

B. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

(<https://pajak.go.id/id/>, 1983) Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 08 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 08 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

UU yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah UU No.08 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. Khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam UU ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 Juli tahun 1984, dengan peraturan pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 Juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

B. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme pemungutan PPN sesuai dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2012 adalah:

1. Mekanisme pemungutan PPN yang pertama dan wajib adalah rekanan wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.
2. Mekanisme pemungutan PPN yang kedua adalah faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. Ketiga adalah SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyeter atas nama rekanan.
4. Keempat adalah dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM maka rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.
5. Kelima adalah faktur pajak dibuat dalam rangkap 3 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.

6. Keenam adalah SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukkan sebagai berikut : lembar kesatu untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

7. Mekanisme Pemungutan PPN yang terakhir adalah faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.(Prabowo, 2016)

C. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2011:5) pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud atau jasa kena pajak. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru (UU No. 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean
- e. Ekspor BKP berwujud oleh PKP
- f. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
- g. Ekspor JKP oleh PKP
- h. Pemanfaatan JKP dari luar pabean kedalam daerah pabean

BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK

D. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 1(3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo (2008:274) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Menurut Waluyo (2011:12) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.

E. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No. 18 tahun 2000 dan No. 42 tahun 2009 pasal 1(6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Suhartono dan Ilyas (2010:15) menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang tergolong pengusaha tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

PENGECEUALIAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK

F. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali UU menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya seperti: minyak tanah, gas bumi, batu bara dll.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat seperti: beras, gabah, jagung, sagu, buah-buahan, sayur-sayuran dll.

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi).

G. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN pada UU No. 42 tahun 2009, menurut Mardiasmo (2008:275) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan social, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi dll.

METODE PENELITIAN

DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang bagaimana perusahaan menyikapi adanya pajak pertambahan nilai yang mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan desain penelitian yang bersifat alamiah, dalam arti peneliti tidak berusaha memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena. Alasan digunakannya metode deskriptif kualitatif untuk penelitian ini dikarenakan data deskriptif dapat dijelaskan secara mendetail dan mendalam. Data yang muncul dalam penelitian kualitatif ini berbentuk kata-kata, dan bukan rangkaian angka. Cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah dengan melakukan wawancara.

SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian ini merupakan Perusahaan Graha Sukses Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bisnis dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Tulungagung.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang merupakan pihak dari perusahaan Graha Sukses Mandiri.

METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (I Made Winartha 2006:155).

PEMBAHASAN

PROFIL SEJARAH PERUSAHAAN

Perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri Tulungagung bergerak di bidang perdagangan bisnis Directselling Offline. ATK (Alat Terapy Kesehatan) dan Pengembangan SDM tujuan memberikan peluang karir yang sebelumnya bernama WWI (World Wild Industries) berdiri pada tahun 1981 di Toronto Canada, dan didirikan oleh MR. MURRAY REINHART dan MR.LARRY TANEBAUM. Perusahaan ini berkembang pesat di seluruh dunia dan seluruh benua. Untuk mempermudah pengontrolan dan koordinasinya maka di buatlah sub-sub organisasi yang berfungsi sebagai pengontrol di negara-negara tertentu disesuaikan dengan bidang usaha yang sedang di kembangkan di negara itu, salah satunya Perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri yang di dirikan pada tahun 1987 oleh MR.CHRIS NIARCHOS yang berpusat di UK (United Kingdom) Inggris.

Perkembangan PT.COBRA INTERNATIONAL begitu pesat di Inggris dan Australia, sehingga perusahaan ini melakukan ekspansi ke Asia termasuk Indonesia. Perusahaan ini masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1994 dibawa oleh MR.TROY MOBBS (Australia) dibantu oleh rekannya MR.JHON RANKINK (Canada).

Sekarang di Indonesia berkembang lebih dari 200 anak perusahaan, salah satunya PT. Asia Graha Sukses Mandiri yang didirikan oleh Vice President di Indonesia yang bernama Bpk. T.A. HARIONO pada Januari 2006. Perusahaan ini meliputi 23 bidang usaha/divisi, diantaranya adalah: Advertising , Application , Charities, Credit, Sports, Product, Tes product, New Letter, Bulletin Telekomunication, Flayer, Clearence , dll.

Di Indonesia saat ini telah berkembang 6 divisi, yaitu:

- a. Divisi Advertising
- b. Divisi Flayer
- c. Divisi Charities
- d. Divisi Application
- e. Divisi Clearence
- f. Divisi Telekomunication

Visi dan Misi PT Asia Graha Sukses Mandiri Tulungagung

VISI :

- a. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) potensial
- b. Perluas kantor (Ekspansi)
- c. Management Training (karier dan non karier)

MISI :

- a. Perluasan kantor di wilayah Indonesia dan wilayah tertentu di Indonesia
- b. Pengangkatan staff ahli (Karyawan tetap/Non kontrak)
- c. Pengangkatan kepala perusahaan (management/owner)
- d. Orientasi management people/ orientasi SDM

ASPEK TUJUAN KE LAPANGAN/VISI PRAKTEK SKILL SDM

Tujuan ke lapangan adalah bagian dari aspek pengembangan skill Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai arahan visi dan misi perusahaan. Tujuan tersebut meliputi 2 aspek:

- a. Pengembangan kecakapan komunikasi/ meliputi skill komunikasi.
- b. Pengembangan diri meliputi: Motivasi diri, Percaya diri, Mentalitas, Kepemimpinan dan Managerial

Sasaran yang ingin dicapai: Menuju staff hanya sampai staff ahli (telah memahami dan menguasai sistem-sistem perusahaan termasuk tugas-tugas sebagai seorang Staff), dan kepercayaan lanjut dari pihak management atas dasar pengembangan SDM menuju Karier (Assistant manager/ Manager/ Owner).

KUALIFIKASI MANAGEMENT

- a. Observasi: Orang yang baru mulai ikut untuk memahami system kerja perusahaan dan untuk mengetahui skill/ kemampuan yang dimilikinya.
- b. Orientasi: Mengenal pembelajaran system perusahaan tentang teori dan praktek oleh supervisor anda masing-masing (5 Langkah komunikasi dan 8 Langkah menuju sukses).
- c. Executive: Dapat memahami system 5 dan 8 langkah, sehingga bisa mengembangkan potensinya untuk handle media (sudah paham dan bisa menjalankan sendiri pembelajaran system yang ada).
- d. Leader: Belajar kepemimpinan, baik memimpin diri sendiri atau memimpin orang lain (harus jadi contoh yang baik untuk orang lain).
- e. Assistant Manager: Disini anda sudah mendapatkan penghasilan dari kantor 20% ditambah juga hasil prestasi anda sendiri (sudah dapatkan gaji tetap).

f. Manager (Owner): Anda membiayai tanggungjawab umum dan tanggungjawab untuk mau menjalankan bisnis ini dengan sportifitas tinggi).

BAGAN MANAGEMENT

KARIR PT ASIA GRAHA SUKSES MANDIRI TULUNGAGUNG

**MENGETAHUI PENDAPAT PERUSAHAAN ADANYA PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)**

Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat maupun suatu perusahaan kepada pemerintah untuk pembiayaan negara tanpa mendapat imbalan secara langsung. Apabila pendapatan pajak menurun, otomatis proses pembangunan negara tidak akan signifikan, namun jika perolehan suatu pajak meningkat maka proses pembangunan tersebut akan signifikan.

Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan namun terkadang perusahaan sering lalai menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dengan berbagai alasan, salah satunya tidak memiliki laporan keuangan sehingga perusahaan tidak dapat menentukan berapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Dari sisi pemerintahan, pajak merupakan sumber utama dari pendapatan negara. Namun dari sisi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dari suatu perusahaan. Meskipun saat ini masih banyak perusahaan yang tidak taat pajak dikarenakan dari berbagai hal, sebenarnya membayar pajak itu memiliki berbagai ragam manfaat. Seperti : Belajar mengelola keuangan, bisnis terlihat lebih profesional, mampu menstabilkan kegiatan perekonomian, dll. Maka dari itu Perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri Tulungagung secara tegas sangat menyikapi dan setuju dengan adanya pajak pertambahan nilai (PPN) dikarenakan adanya ketentuan dari pihak perusahaan pusat dan sudah distandarkan dengan aturan yang berlaku bagi perusahaan.

MEMAHAMI TINGKAT KEDISIPLINAN PERUSAHAAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Kesadaran dan kepedulian sukarela dari Wajib Pajak (WP) sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'Pajak' tidak ada frase yang dapat dipaksakan dan yang bersifat memaksa. Bertitik tolak dari fase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan suatu pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat atau perusahaan dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak dikarenakan masih merasa seperti upeti, yang

memberatkan pembayarannya, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan kesulitan dalam menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela, bukan karena keterpaksaan.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahnya, maka semakin tinggi kesadaran untuk membayar pajak, namun tidak hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya yaitu penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan, dan perluasan subjek dan objeknya.

Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan adanya kesadaran pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan.

MENGETAHUI DAMPAK YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DENGAN ADANYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak merupakan suatu pemungutan yang dibayarkan oleh seluruh rakyat baik secara pribadi maupun secara badan usaha berpenghasilan kena pajak sesuai yang telah ditentukan. Pajak memiliki peranan penting bagi kemajuan penting bagi perekonomian suatu negara serta membawa pengaruh bagi perusahaan.

Berikut ini merupakan pengaruh pajak terhadap perusahaan :

1. Mendorong perkembangan perusahaan

Mengukuhkan perusahaan menjadi perusahaan kena pajak (PKP) adalah langkah awal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong perusahaan tersebut menjadi lebih besar dan profesional.

2. Menentukan nilai akhir laba perusahaan

Dalam perusahaan pengusaha seringkali mengidentifikasikan pajak sebagai beban. Pajak dianggap sebagai beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya pajak,

pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayar agar apa yang diperoleh akan lebih optimal.

3. Perusahaan melakukan perencanaan dan manajemen pajak

Perencanaan pajak dan manajemen pajak biasanya dilakukan perusahaan sebagai salah satu cara untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin agar tetap memperoleh laba yang diinginkan. Cara tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak agar perusahaan tetap untung.

4. Reputasi perusahaan

Perusahaan yang dalam seluruh kegiatannya kurang atau sering terlambat dalam membayar pajak dapat memperburuk citra perusahaan. Dengan lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan perusahaan, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain itu, perusahaan juga bisa mencatat berbagai hal-hal penting dimana perusahaan harus setor atau lapor pajak.

5. Mengetahui letak efisiensi perusahaan

Perusahaan yang tidak kena pajak lebih berpotensi dalam mengalami pemborosan keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan kurang mengkaji dan merencanakan keuangan perusahaannya dengan matang, termasuk perhitungan nilai akhir besar laba perusahaan. Dampak bagi perusahaan: perusahaan semakin menerapkan sistem kerja yang maksimal dan teratur dan hasil bisnis yang maksimal.

MEMAHAMI MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN

Pajak perusahaan bulanan wajib dibayarkan agar usaha yang dijalankan semakin melejit dan semakin kredibel di mata klien. Setelah mendirikan dan memperoleh perizinan memulai usaha atau bisnis, ada beberapa kewajiban perusahaan terkait dengan pajak yang harus dipatuhi. Umumnya, perusahaan hanya sibuk mengurus pajak pada masa-masa pelaporan SPT Tahunan. Padahal kewajiban tersebut ada yang harus dipenuhi bulanan dan tahunan.

Semua perusahaan baik itu berbentuk perusahaan perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum, apabila telah memiliki NPWP maka sudah melekat kewajiban perpajakan pada perusahaan tersebut. Hal ini tercantum pada pasal 3 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur Jendral Pajak.”

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak baik perusahaan maupun perorangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri atau yang biasa dikenal dengan istilah “*Self-Assesment System*”. Walaupun wajib pajak perusahaan diberikan kepercayaan oleh kantor pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, namun jangan disalahgunakan, karena akan mendapat sanksi yang berat. Pasal 13A UU No. 6 Tahun 1983 menyatakan bahwa: “Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut diwajibkan untuk melunasi kekurangan jumlah kekurangan pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).”

PENUTUP

Kesimpulan

Pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun perusahaan yang melakukan transaksi pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan masih kurang yang mana meskipun mengetahui bahwa penghasilan yang diperoleh melalui transaksi pajak merupakan objek pajak, tetap saja baik masyarakat dan perusahaan tersebut tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kewajiban pemenuhan pajaknya dengan tidak memasukkan penghasilan dari transaksi pajak yang dilakukan ke dalam SPT tahunannya. Bahkan ada perusahaan yang tidak mengetahui transaksi pajak yang dilakukannya itu dikenai pajak penghasilan.

Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi pajak dalam setiap tahun.

HASIL PENELITIAN

Peneliti melakukan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara, serta melakukan observasi dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat maupun perusahaan tentang adanya pajak pertambahan nilai, bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat maupun perusahaan dalam membayar pajak, dan bagaimana dampak dari adanya pajak pertambahan nilai (PPN).

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu peserta trainee, yaitu Sdr. Apoli Benediktus Yahya dalam kaitannya dengan bagaimana saja pendapat-pendapat dari adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Responden menyatakan bahwa :

“Eksistensi tentang adanya pajak pertambahan nilai (PPN) di perusahaan Asia Graha Sukses Mandiri Tulungagung ini rupanya sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan akan semakin menerapkan sistem kerja yang maksimal dan teratur sehingga menjadikan tingkat penjualan dapat mencapai target yang diharapkan”.

Seiring dengan adanya pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayarkan baik masyarakat maupun perusahaan, keduanya memberikan suatu pernyataan bahwa: “Adanya pajak pertambahan nilai (PPN) ini mampu berdampak kepada perkembangan dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Yaitu: mampu mendorong perkembangan kinerja perusahaan, menentukan nilai akhir dari laba perusahaan, menjaga reputasi perusahaan, dan perusahaan akan melakukan suatu perencanaan dan manajemen pajak.

DAFTAR PUSTAKA

(Prabowo, 2016)

<https://pajak.go.id/id/>. (1983). *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. [Https://Pajak.Go.Id/Id/](https://Pajak.Go.Id/Id/).

Prabowo, R. G. M. (2016). *dan PPnBM*.

Rafinzka, Kezia. 2018. Pasal 4 UU PPN : Mengenal Objek Pajak Pertambahan Nilai. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pasal-4-uu-ppn> (diakses tanggal 6 Januari 2021)

Objek PPN. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/objek-ppn> (diakses tanggal 6 Januari 2021)

Irwanto, Budi. 2019. Subjek PPN. <https://www.thinktax.id/tax-flash/subjek-ppn> (diakses tanggal 6 Januari 2021)

http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf (diakses tanggal 6 Januari 2021)

Amalia, Dina. 2017. 4 Manfaat Membayar Pajak bagi Pengusaha. <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-3-manfaat-membayar-pajak-bagi-pengusaha/> (diakses tanggal 9 Januari 2021)

Susanto, Herry. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak> (diakses tanggal 9 Januari 2021)

Prabandaru, Ageng. 2019. Perlunya Mengetahui Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan. <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pengaruh-pajak-terhadap-perusahaan/> (diakses pada tanggal 9 Januari 2021)

Kareem, Aryanda. 2019. Pajak Perusahaan yang Harus Dipenuhi Tiap Bulan saat Menjalankan Bisnis. <https://www.easybiz.id/pajak-perusahaan-tiap-bulan/> (diakses pada tanggal 9 Januari 2021)